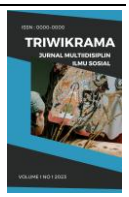
Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Volume 11 No 9 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



URGENSITAS KOMUNIKASI PEMERINTAHAN DALAM KEBIJAKAN PUBLIK : STUDI KASUS PADA KEBIJAKAN KENAIKAN PBB 250 DI KABUPATEN PATI TAHUN 2025-1

Divio Muhamad Julian[1], Ziofari Baldi Amanta[2], Nabil Khairul Akmal[3], Subhan Saladin[4], Sahrul Romdoni[5], Ivan Darmawan[6], Yayan Nuryanto[7], Antik Bintari[8]

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:
Received Desember 2025
Revised Desember 2025
Accepted Desember 2025
Available online Desember 2025

Email:
divio23001@mail.unpad.ac.id ,
ziofari23001@mail.unpad.ac.id,
nabil23001@mail.unpad.ac.id,
subhan23001@mail.unpad.ac.id ,
sahrul23001@mail.unpad.ac.id ,
ivan.darmawan@mail.unpad.ac.id ,
yayan.nuryanto@mail.unpad.ac.id ,
antik.bintari@mail.unpad.ac.id

This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright © 2025 by Author.

Abtrak

Penelitian ini membahas urgensitas komunikasi pemerintahan dalam proses kebijakan publik dengan studi kasus kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar 250% di Kabupaten Pati tahun 2025. Kebijakan tersebut menimbulkan resistensi publik karena minimnya sosialisasi, kurangnya pelibatan masyarakat, dan munculnya pernyataan publik dari Bupati yang dianggap tidak sensitif terhadap kondisi sosial. Penelitian menggunakan metode studi literatur dan analisis studi kasus terhadap dokumen kebijakan, pemberitaan, serta teori komunikasi pemerintahan dan kebijakan publik. Temuan menunjukkan bahwa kegagalan komunikasi pada tahap perumusan hingga implementasi kebijakan menyebabkan krisis kepercayaan, aksi protes berskala besar, serta delegitimasi terhadap pemerintah daerah. Penelitian ini menegaskan bahwa komunikasi yang efektif, partisipatif, dan transparan merupakan prasyarat penting dalam memperkuat legitimasi dan keberterimaan kebijakan publik.

Kata kunci: komunikasi pemerintahan; kebijakan publik; PBB; legitimasi; partisipasi

1. Pendahuluan

Komunikasi pemerintahan merupakan unsur esensial dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan. Betapa tidak, pasalnya pemerintahan sendiri mengacu pada aktivitas kekuasaan dalam berbagai ranah publik yang tidak hanya merujuk pada pemerintah itu sendiri namun berkaitan pula pada aktivitas dalam berbagai konteks kelembagaan dengan tujuan mengarahkan, mengendalikan, mengatur semua hal yang berkaitan dengan ranah publik (Labolo, 2023: 23). Beach (1975) menyampaikan bahwa bagaimanapun organisasi pemerintahan tidak akan dapat melaksanakan fungsinya, dan tidak akan dapat mengefisienkan dan mengefektifkan penggunaan sumber-sumbernya, dan pada akhirnya tidak akan dapat mencapai tujuannya tanpa komunikasi.

Di negara yang demokratis, proses komunikasi tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyampaian kebijakan dari pemerintah kepada masyarakat, tetapi juga sebagai mekanisme interaksi dua arah yang mencerminkan transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi publik dalam pengambilan keputusan. Atas dasar hal tersebut, pemerintah yang ideal harus mensyaratkan adanya komunikasi yang terbuka, empati, dan partisipatif antara aktor pemerintah dan masyarakat. Hal ini penting karena keberhasilan kebijakan publik tidak hanya ditentukan oleh substansi kebijakan itu sendiri, tetapi juga oleh cara pemerintah berkomunikasi, bagaimana kebijakan itu dikomunikasikan, disosialisasikan, serta diterima oleh masyarakat. Komunikasi menjadi instrumen utama untuk membangun legitimasi dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Pada realitanya, pemerintahan kerap kali seringkali menunjukkan lemahnya praktik komunikasi pemerintahan yang demokratis, baik di skala nasional maupun lokal. Salah satu contoh paling aktual adalah kasus yang terjadi di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, di bawah

kepemimpinan Bupati Sudewo. Pada tahun 2025 Bupati Pati memutuskan kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga mencapai 250%. Kebijakan tersebut memicu gelombang protes besar-besaran dari masyarakat karena dianggap memberatkan kondisi ekonomi rakyat pasca pandemi dan tidak melalui proses komunikasi publik yang memadai.

Dalam berbagai pemberitaan perihal gencarnya kebijakan tersebut, masyarakat menilai bahwa kebijakan ini muncul secara tiba-tiba tanpa sosialisasi yang jelas, tanpa pelibatan masyarakat dalam proses perumusan, dan tanpa argumentasi publik yang transparan. Pernyataan Bupati Sudewo yang dinilai arogan, seperti pernyataannya bahwa "meskipun 50.000 massa yang turun aksi, kebijakan tetap tidak akan dibatalkan." menjadi simbol buruknya komunikasi kepemimpinan dan kegagalan dalam memahami aspirasi rakyat.

Kegagalan tersebut menunjukkan lemahnya kemampuan pemerintah daerah dalam membangun komunikasi yang partisipatif dan berorientasi terhadap masyarakat. Pemerintah daerah seharusnya tidak hanya berperan sebagai pengambil keputusan, tetapi juga sebagai komunikator publik yang mampu menjelaskan maksud, tujuan, serta dampak dari setiap kebijakan secara terbuka dan dialogis. Dalam kasus yang terjadi di Kabupaten Pati, absennya komunikasi yang efektif telah mempersempit ruang dialog antara pemerintah dan masyarakat. Akibatnya, proses komunikasi berubah menjadi satu arah yang hanya menekankan instruksi, bukan partisipasi. Model komunikasi *top down* ini bertentangan dengan prinsip demokrasi deliberatif yang mengutamakan musyawarah, keterbukaan, dan penghargaan terhadap aspirasi warga.

Fenomena tersebut menggambarkan bagaimana komunikasi pemerintahan yang buruk dapat menjadi faktor penghancur nilai-nilai demokrasi. Ketika masyarakat merasa tidak didengar, tidak dilibatkan, dan bahkan diremehkan oleh pemimpinnya, maka kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan menurun drastis. Keadaan ini berpotensi menciptakan delegitimasi terhadap kebijakan, polarisasi sosial, hingga *political distrust*. Dalam konteks demokrasi, komunikasi yang tidak empatik dan tidak partisipatif dapat memunculkan resistensi sosial seperti demonstrasi, konflik politik, bahkan tuntutan pengunduran diri pejabat publik sebagaimana terjadi di Kabupaten Pati.

Kasus ini mencerminkan pula adanya kegagalan dalam fungsi komunikasi internal pemerintahan, di mana koordinasi antara eksekutif dan legislatif daerah

tidak berjalan optimal. DPRD sebagai lembaga representatif rakyat tampak kurang memainkan peran komunikatif dalam menjembatani kepentingan warga dengan kebijakan pemerintah daerah. Hal ini memperparah kesenjangan komunikasi vertikal antara pemerintah dan rakyat. Padahal dalam sistem pemerintahan daerah yang demokratis, setiap kebijakan publik idealnya disusun melalui proses komunikasi politik yang melibatkan berbagai aktor pemerintah, DPRD, masyarakat serta media

2. Tinjauan Pustaka

Komunikasi Pemerintahan

Komunikasi adalah proses penyampaian informasi-informasi, pesan, gagasan atau pengertian, dengan menggunakan lambang-lambang yang mengandung arti atau makna, baik secara verbal atau non verbal dari seseorang atau kelompok orang kepada seseorang atau kelompok orang lainnya dengan tujuan untuk mencapai saling pengertian dan/ atau kesepakatan bersama. Hakikatnya ini adalah proses ekspresi antar manusia, setiap manusia mempunyai kepentingan untuk menyampaikan pikirannya. Dalam bahasa komunikasi, setiap orang atau sesuatu yang menyampaikan sesuatu tersebut sebagai komunikator. Sesuatu yang disampaikan atau diekspresikan adalah pesan. Lalu, yang menerima pesan bisa kita sebut komunikan.

Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Volume 11 No 9 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

Komunikasi Pemerintahan adalah penyampaian ide, program, dan gagasan Pemerintah kepada masyarakat dalam rangka mencapai tujuan bersama. Dalam hal ini pemerintahan dapat diasumsikan sebagai komunikator dan masyarakat sebagai komunikan. Namun dalam suasana tertentu bisa sebaliknya masyarakat berada pada posisi sebagai penyampai ide atau gagasan dan pemerintah bisa berada pada posisi mencermati apa yang diinginkan masyarakat.

Pada dasarnya merupakan proses pertukaran pesan yang berlangsung dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan. Komunikasi ini melibatkan penyampaian informasi, kebijakan, arahan, maupun respons antara pemerintah dan berbagai pihak yang berkepentingan. Dalam kerangka tersebut, komunikasi tidak hanya dilihat sebagai proses penyampaian informasi, tetapi juga sebagai aktivitas yang mempengaruhi pemahaman, sikap, serta perilaku pihak yang menerimanya

Tanpa disadari mekanisme Komunikasi Pemerintahan merupakan mekanisme yang vital atau penting yang menghubungkan pemerintah dengan masyarakat. Pemerintah bertindak sebagai komunikator utama yang menyampaikan gagasan, program, dan kebijakan publik, sementara masyarakat berperan sebagai penerima pesan yang kemudian memberi tanggapan. Namun hubungan ini tidak bersifat satu arah. Masyarakat pun dapat menjadi pengirim pesan melalui penyampaian

aspirasi, kritik, maupun kebutuhan yang harus direspons pemerintah. Proses dua arah ini menunjukkan bahwa komunikasi pemerintahan berperan dalam membangun hubungan yang responsif antara negara dan warganya **(**Abidin, 2016).

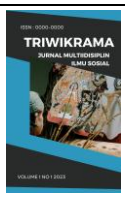
Dalam konteks modern, komunikasi pemerintahan juga berkembang dengan adanya perubahan teknologi informasi. Pemerintah kini memanfaatkan saluran digital, media sosial, dan platform daring sebagai sarana komunikasi publik. Hal ini membuat proses komunikasi semakin cepat, luas, dan interaktif. Keberadaan media tersebut menjadikan pemerintah perlu merumuskan strategi komunikasi yang lebih terarah agar pesan yang disampaikan dapat diterima dengan jelas dan tidak menimbulkan misinformasi di masyarakat. Dengan demikian, komunikasi pemerintahan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga strategis

Ruang lingkup komunikasi pemerintahan mencakup dua ranah utama, yaitu komunikasi internal dan komunikasi eksternal. Komunikasi internal berlangsung di antara aparatur pemerintahan, mulai dari pejabat hingga staf pelaksana. Melalui komunikasi internal, pemerintah menyampaikan instruksi, pembagian tugas, koordinasi, serta laporan hasil kerja. Proses ini memastikan bahwa setiap anggota organisasi memahami tanggung jawab dan tujuan yang ingin dicapai sehingga kinerja pemerintahan dapat berjalan efektif dan efisien

Sementara itu, komunikasi eksternal mencakup interaksi antara pemerintah dengan masyarakat, lembaga legislatif, dunia usaha, organisasi masyarakat sipil, dan berbagai aktor lain di luar struktur pemerintahan. Dalam ranah ini, pemerintah mensosialisasikan kebijakan, memberikan informasi publik, sekaligus menerima umpan balik dari masyarakat. Komunikasi eksternal berfungsi untuk memastikan bahwa kebijakan publik dipahami oleh warga serta memberikan ruang bagi masyarakat untuk turut terlibat dalam proses pemerintahan. Ruang lingkup ini mencerminkan bagaimana komunikasi diperlukan dalam membangun partisipasi publik sekaligus legitimasi kebijakan pemerintah

Secara keseluruhan, komunikasi pemerintahan berfungsi sebagai pengikat koordinasi internal sekaligus penghubung antara pemerintah dan masyarakat. Melalui komunikasi yang efektif, pemerintah dapat menciptakan kerja sama antarlembaga, meningkatkan penerimaan publik terhadap kebijakan, dan membangun pemerintahan yang lebih terbuka. Dengan demikian, komunikasi menjadi instrumen fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik sebagai fungsi administrasi maupun sebagai sarana membangun hubungan antara negara dan warganya (Abidin, 2016)

Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Volume 11 No 9 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



Urgensitas Komunikasi Pemerintahan Di Negara Demokratis Dalam Konteks Kebijakan

Komunikasi Pemerintahan menjadi sebuah instrumen yang sangat penting dalam sebuah manajemen kebijakan, dimulai dengan proses perumusan sampai implementasi, komunikasi menjadi point penting dalam membuat kebijakan yang baik untuk masyarakat di dalam sebuah daerah yang dipimpin oleh suatu pemerintahan. Komunikasi menjadi sebuah proses untuk sebuah kebijakan, yang nantinya masyarakat melihat kebijakan sebagai proses yang dinamis, bukan sebagai keputusan tunggal bagi masyarakat yang menerima kebijakan yang dibuat.

Urgensitas komunikasi pemerintahan di negara demokratis dalam mengimplementasikan sudah diramalkan oleh para ilmuwan terdahulu salah satunya seperti Brewer dan deLeon yang mempunyai anggapan bahwa kebijakan publik bukanlah hasil dari satu keputusan tunggal, melainkan proses yang berkelanjutan, di mana hasil dari satu tahap menjadi masukan bagi tahap berikutnya. Anggapan tersebut tersirat bahwa “proses” yang dimaksud salah satunya yaitu komunikasi antara penerima kebijakan dan pembuat kebijakan.

Proses komunikasi dalam sebuah kebijakan bukan hanya tentang bagaimana kebijakan akan dirumuskan dan bagaimana kebijakan akan disampaikan untuk diimplementasikan. Komunikasi dalam sebuah kebijakan memiliki banyak proses sebagaimana yang bisa dipahami dari teori siklus kebijakan yang dibuat oleh banyak ilmuwan seperti laswell, Brewer, deLeon dll nya, komunikasi pemerintahan bisa dikaitkan dengan teori teori kebijakan publik seperti teori agenda setting (seperti Multiple Streams Framework milik Kingdon) dapat ditempatkan pada tahap awal siklus, sedangkan teori implementasi (seperti

model top-down dan bottom-up) dapat dikaitkan dengan tahap pelaksanaan kebijakan.

Seiring dengan semakin rumitnya tata kelola pemerintahan modern, pelaksanaan kebijakan tidak lagi dapat bergantung pada satu lembaga saja. Kini, implementasi kebijakan menuntut kerja sama lintas sektor dan tingkatan pemerintahan. Proses yang dikenal sebagai multi-level governance ini hanya dapat berhasil jika didukung oleh koordinasi, komunikasi, dan kepercayaan yang kuat antar semua aktor yang terlibat.

Keberhasilan implementasi kebijakan bergantung pada serangkaian faktor krusial. Elemen internal seperti kejelasan tujuan, kecukupan sumber daya, dan struktur organisasi yang efisien menjadi fondasi utama. Jika tujuan kebijakan ambigu, pelaksana di lapangan akan kebingungan; sementara keterbatasan anggaran dan birokrasi yang kaku akan memperlambat eksekusi. Namun, keberhasilan juga menuntut kemampuan adaptasi dan inovasi dari para pelaksana untuk menyesuaikan kebijakan dengan konteks lokal.

Menguatkan hal ini, Hill dan Hupe menyoroti dimensi komunikasi sebagai faktor vital. Proses penyampaian pesan dari pusat ke pelaksana harus jernih dan terbuka untuk menghindari distorsi atau kesenjangan interpretasi, yang merupakan penyebab umum kegagalan. Komunikasi yang efektif berfungsi membangun komitmen dan pemahaman bersama, sekaligus meredam potensi konflik.

Di luar faktor teknis dan komunikasi, dimensi politik memainkan peran sentral dalam sebuah proses kebijakan. Implementasi bukanlah proses steril yang bersifat teknokratis, melainkan sebuah arena yang diwarnai oleh dinamika kekuasaan dan negosiasi kepentingan. Aktor politik acap kali memanfaatkan tahap pelaksanaan ini untuk membelokkan arah kebijakan. Ini membuktikan bahwa implementasi adalah panggung politik yang dinamis, penuh dengan kompromi dan potensi konflik.

Dengan beberapa pernyataan yang sudah disampaikan, proses sebuah kebijakan dibuat dari hal yang bersifat teknis bahkan hingga yang bersifat politis pentingnya komunikasi yang baik dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan publik harus dilakukan secara baik agar dapat diterima masyarakat. Kini pemerintah seharusnya lebih adaptif dan lebih terbuka dalam memanfaatkan akses

komunikasi yang sudah ada. Namun rasanya masih banyak juga pemerintah yang kurang berdialog untuk merumuskan serta mengimplementasikan kebijakannya secara dua arah dengan masyarakatnya itu sendiri, salah satunya permasalahan kebijakan Bupati Pati yang membuat kebijakan untuk masyarakat Kabupaten Pati dengan penuh niat baik, namun menjadi kebijakan itu menjadi pesan api untuk membara amarah masyarakat Pati kepada Pemerintah Kabupaten Pati.

Analisis Komunikasi Pemerintahan dalam Kasus Kenaikan PBB 250% di Kabupaten Pati

Demonstrasi besar dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Pati di depan kantor Bupati Pati pada hari Rabu, 13 Agustus 2025. Masyarakat yang mengatasnamakan pergerakannya sebagai Aliansi Masyarakat Pati Bersatu ini menuntut agar Sudewo mengundurkan diri atau dimakzulkan dari jabatannya sebagai Bupati Kabupaten Pati.1 Tuntutan ini lahir dari keresahan masyarakat atas buruknya aktivitas pemerintahan Kabupaten Pati yang berkaitan dengan hajat publik. Karena sejatinya, publik lah yang memberikan legitimasi kepada pemerintah sehingga publik berhak menilai seberapa pantas dan wajar kekuasaan pemerintah patut dilakukan (Labolo, 2023: 24).

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan munculnya pusaran demonstrasi masyarakat Pati. Yang menjadi faktor utama adalah diundangkannya Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Besaran Persentase dan Pertimbangan Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada tanggal 5 Mei 2025. Sejak diundangkannya peraturan ini, gelombang penolakan masyarakat sebenarnya sudah mulai mengemuka. Namun, eskalasi aksi yang dilakukan belum terlalu masif.

Makin hari, gelombang penolakan masyarakat semakin membesar. Puncaknya adalah ketika Bupati Sudewo mengeluarkan pernyataan yang bernada negatif dan cenderung mendiskreditkan eskalasi pergerakan masyarakat. Hal Demonstrasi besar dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Pati di depan kantor Bupati Pati pada hari Rabu, 13 Agustus 2025. Masyarakat yang mengatasnamakan pergerakannya sebagai Aliansi Masyarakat Pati Bersatu ini menuntut agar Sudewo mengundurkan diri atau dimakzulkan dari jabatannya sebagai Bupati Kabupaten Pati.1 Tuntutan ini lahir dari keresahan masyarakat atas buruknya aktivitas pemerintahan Kabupaten Pati yang berkaitan dengan hajat publik. Karena sejatinya, publik lah yang memberikan legitimasi kepada pemerintah sehingga publik berhak menilai seberapa pantas dan wajar kekuasaan pemerintah patut dilakukan (Labolo, 2023: 24).

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan munculnya pusaran demonstrasi masyarakat Pati. Yang menjadi faktor utama adalah diundangkannya Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Besaran Persentase dan Pertimbangan Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada tanggal 5 Mei 2025. Sejak diundangkannya peraturan ini, gelombang penolakan masyarakat sebenarnya sudah mulai mengemuka. Namun, eskalasi aksi yang dilakukan belum terlalu masif. Makin hari, gelombang penolakan masyarakat semakin membesar. Puncaknya adalah ketika Bupati Sudewo mengeluarkan pernyataan yang bernada negatif dan cenderung mendiskreditkan eskalasi pergerakan masyarakat.

Analisis Komunikasi Pemerintahan dalam Kasus di Kabupaten Pati

Komunikasi merupakan hal yang sangat krusial dalam aktivitas pemerintahan termasuk dalam hal kebijakan publik. Sebelumnya telah dijelaskan pula urgensitas komunikasi dalam siklus kebijakan publik. Pentingnya komunikasi dalam setiap tahapan dalam siklus kebijakan publik seharusnya dapat lebih disadari oleh para pemangku kebijakan setelah berkaca dari apa yang terjadi di Kabupaten Pati di tengah tahun. Kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

hingga 250% oleh Bupati Pati Sudewo dapat dibaca sebagai contoh konkret bagaimana komunikasi pemerintahan yang tidak efektif dapat menimbulkan resistensi publik dan memperlemah legitimasi kebijakan.

Mengacu pada pandangan Brewer dan deLeon bahwa kebijakan publik merupakan proses berkelanjutan yang setiap tahapnya menjadi masukan bagi tahap berikutnya, tampak bahwa proses komunikasi antara pembuat kebijakan (pemerintah daerah) dan penerima kebijakan (masyarakat Pati) tidak berjalan optimal. Kenaikan PBB yang sangat signifikan seharusnya ditempatkan dalam kerangka siklus kebijakan, di mana pada tahap perumusan diperlukan agenda setting yang melibatkan identifikasi masalah secara tepat: apakah benar beban

fiskal daerah atau ketimpangan valuasi tanah adalah persoalan utama. Namun tanpa komunikasi awal yang transparan, publik tidak memahami logika kebijakan yang diambil dan menilai kebijakan tersebut sebagai keputusan sepihak.

Dalam perspektif teori agenda setting, khususnya Multiple Streams Framework Kingdon, seharusnya pemerintah daerah menyelaraskan problem stream, policy stream, dan political stream. Jika pemerintah memandang perlunya peningkatan PAD melalui PBB sebagai solusi fiskal, maka komunikasi menjadi krusial agar masyarakat mengetahui problem yang ingin dipecahkan. Ketika komunikasi minim, jendela kebijakan (policy window) yang dibuka oleh pemerintah tidak diterima publik, karena masyarakat tidak melihat adanya urgensi atau rasionalitas yang memadai. Hal ini menandakan kegagalan pemerintah daerah dalam menghubungkan tiga aliran tersebut secara komunikatif sebelum kebijakan dinaikkan secara drastis.

Dalam tahap implementasi kebijakan, model top-down yang tampaknya digunakan oleh Bupati Pati memperlihatkan kelemahan ketika instruksi dibuat tanpa koordinasi yang baik dengan pelaksana di level desa atau kecamatan. Hill dan Hupe menekankan pentingnya kejelasan pesan dan konsistensi informasi dari pusat ke pelaksana. Namun pada kasus Pati, banyak perangkat desa dan masyarakat mengaku baru mengetahui kenaikan setelah nilai PBB terbit, menunjukkan bahwa rantai komunikasi vertikal mengalami distorsi. Kurangnya ruang dialog dan penjelasan menyebabkan kebijakan sulit diterima, serta memunculkan interpretasi negatif seperti dugaan bahwa kebijakan dibuat demi kepentingan politik tertentu.

Kasus ini menegaskan bahwa kebijakan publik, baik teknis maupun politis, tidak dapat berhasil tanpa komunikasi pemerintahan yang terbuka, dialogis, dan partisipatif. Kenaikan PBB 250% di Pati menggambarkan bagaimana absennya komunikasi menyebabkan kebijakan gagal dipahami sebagai bagian dari proses yang dinamis, melainkan dipersepsikan sebagai keputusan sepihak yang membebani masyarakat. Jika pemerintah daerah menerapkan pola komunikasi yang lebih sistematis sejak perumusan hingga implementasi dengan melalui konsultasi publik, sosialisasi berjenjang, serta transparansi mengenai alasan dan dampak kebijakan, maka penerimaan masyarakat dapat meningkat dan konflik dapat diminimalkan. Dengan demikian, kasus Pati menjadi pelajaran penting bahwa kualitas komunikasi pemerintahan adalah kunci dalam menjaga legitimasi dan keberhasilan implementasi kebijakan publik.

Dampak Terhadap Dinamika Sosial

Buruknya komunikasi pemerintah dalam kebijakan kenaikan PBB 250% telah memicu erosi kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan di Kabupaten Pati. Dalam kerangka teori *public sphere* Habermas (1991), ketiadaan ruang diskursif yang sehat antara pemerintah dan masyarakat telah mengakibatkan apa yang disebut Habermas sebagai *legitimation crisis* yaitu krisis legitimasi dimana kebijakan negara tidak lagi diakui sebagai sah oleh warga negara. Dalam kasus Pati, ketiadaan dialog yang partisipatif menimbulkan persepsi bahwa pemerintah tidak lagi berorientasi pada pelayanan publik, melainkan pada kepentingan fiskal semata. Levi & Stoker (2000) menyatakan bahwa ketika kepercayaan publik hilang, masyarakat cenderung

Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Volume 11 No 9 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

menolak bekerja sama dengan pemerintah, bahkan dalam program-program yang sebenarnya menguntungkan mereka. Di Pati, hal ini tercermin dari penolakan massal terhadap kenaikan PBB dan tuduhan-tuduhan korupsi yang beredar di masyarakat meskipun belum disertai bukti yang kuat.

Dalam jangka pendek, kegagalan komunikasi pemerintahan langsung memicu *political distrust* yang besar. Puncak dari *political distrust* warga Kabupaten Pati adalah aksi demonstrasi besar-besaran yang dilakukan pada tanggal 13 Agustus 2025. Aksi protes yang diikuti oleh ribuan massa, terdiri dari petani, nelayan, pedagang, dan kelompok masyarakat lainnya, menunjukkan tingkat ketidakpuasan masyarakat yang tinggi terkhususnya terhadap Pemerintah Kabupaten Pati. Lokasi aksi terpusat di Alun-alun Kota Pati, area depan pintu masuk Pendopo Kabupaten. Tuntutan utama demonstrasi tersebut adalah pemakzulan atau pengunduran diri Bupati Pati, Sudewo, yang dinilai menunjukkan pola kepemimpinan yang bersifat arogan. Pernyataan ini secara eksplisit disampaikan oleh Husen (Inisiator) dan Syaiful Ayubi (Orator aksi).

Dalam kasus Sudewo, permintaan maaf terlambat dan pernyataan yang telah tersebar luas sulit ditarik kembali, karena dalam teori komunikasi publik, pesan itu bersifat *irreversible*. Demonstrasi yang dilakukan di atas berfungsi sebagai mekanisme katarsis kolektif sekaligus bentuk *pressure* politik terhadap pemerintah daerah untuk merevisi kebijakan yang dianggap tidak populis tersebut. Aksi demonstrasi yang dilakukan di Pati juga sekaligus menjadi salah satu pemantik bagi aksi-aksi demonstrasi yang dilakukan dalam skala nasional seperti yang terjadi sepanjang bulan Agustus sampai awal September di Jakarta, Bandung, Surabaya, Jogja, Makassar, dan kota-kota besar lainnya di Indonesia. Fenomena ini menunjukkan bagaimana komunikasi pemerintah yang tidak partisipatif dapat memicu mobilisasi massa yang bersifat spontan dan meluas. Gelombang demonstrasi ini juga merupakan respons langsung terhadap kegagalan komunikasi pemerintah serta merepresentasikan munculnya *counter-public sphere*, yakni ruang publik alternatif yang dibentuk oleh masyarakat ketika ruang publik formal tidak berfungsi.

Kondisi ini tidak hanya berimplikasi pada penurunan legitimasi sosial terhadap kepala daerah, tetapi secara simultan memicu degradasi kepercayaan publik secara instan terhadap seluruh institusi dan lembaga Pemerintah Daerah. Skeptisisme yang meluas di kalangan masyarakat terhadap kebijakan dan pernyataan resmi yang dirilis merupakan konsekuensi langsung dari krisis komunikasi tersebut. Lebih lanjut, kegagalan komunikasi yang berujung pada aksi demonstrasi massal ini menimbulkan dampak reputasi negatif berskala nasional bagi partai politik (Parpol) pengusung Bupati Sudewo. Sebagai kader Partai Gerindra, kontroversi Sudewo langsung mendapat sorotan nasional dan bahkan mendapat teguran keras dari pimpinan partai. Fenomena tersebut bisa saja dieksploitasi oleh kelompok oposisi sebagai instrumen politik untuk mendiskreditkan kredibilitas Parpol dalam proses kaderisasi dan pengawasan kepala daerah.

Dalam jangka panjang, dampak komunikasi yang buruk akan mengakar menjadi hambatan struktural bagi daerah. Proses perumusan dan pengesahan kebijakan pembangunan, seperti Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), sangat bergantung pada dukungan sinergis dari lembaga legislatif dan partisipasi publik. Namun, apabila kepercayaan politik telah tererosi secara signifikan, legislatif (DPRD) dan masyarakat akan cenderung mengadopsi sikap skeptis atau bahkan menolak inisiatif kebijakan yang diajukan oleh eksekutif. Akibatnya, kebijakan yang seyogyanya memiliki nilai strategis dan urgensi substansial dapat gagal diimplementasikan jika fondasi komunikasi politik tidak direhabilitasi. Suasana politik yang disfungsional ini secara empiris mendemonstrasikan bagaimana pelemahan terus-menerus terhadap kepercayaan publik dan dukungan dewan dapat mengakibatkan instabilitas politik yang berkepanjangan di tingkat daerah.

Di sisi ekonomi, kepemimpinan yang dipandang tidak stabil dan tidak transparan akan merusak iklim investasi daerah. Kondisi ketidakpastian masyarakat terhadap kebijakan dan kepemimpinan yang kontroversial membuat investor enggan menanam modal. Penilaian pasar dan investor atas sebuah daerah atau negara sangat dipengaruhi oleh citra kepemimpinan dan kepastian hukum. jika pejabat sering memberikan pernyataan yang berubah-ubah atau tidak jelas, *confidence* investor akan menurun drastis. Penghambatan investasi ini secara kumulatif dapat menghambat pertumbuhan ekonomi lokal dalam jangka panjang.

Lebih jauh, reputasi buruk kepemimpinan Bupati menjadi legasi negatif yang sulit dilenyapkan. Sejarah akan mencatat pejabat yang dipenuhi kontroversi, yang kemudian ikut membentuk persepsi publik tentang pemerintahan daerah dan partai pengusungnya. Warisan buruk ini bisa menurunkan tingkat kepercayaan pemilih terhadap calon pemimpin berikutnya, terutama jika berasal dari partai atau kelompok politik yang sama. Dalam hal ini, beban sejarah komunikasi yang defisit kepercayaan dapat menghambat legitimasi pemimpin baru, karena rakyat masih mengaitkan nama partai atau institusi tersebut dengan konflik masa lalu.

Terakhir, gaya komunikasi defensif atau arogan dapat mengikis budaya demokrasi dan partisipasi politik di masyarakat. Dalam demokrasi, komunikasi publik idealnya menekankan keterlibatan warga, transparansi, dan empati. Ketika pola komunikasi pejabat lebih banyak *top down* daripada mengajak masyarakat untuk berdialog, partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan publik akan cenderung melemah. Rakyat yang merasa suaranya tidak didengar atau diabaikan menjadi apatis dan enggan terlibat. Akibatnya, kualitas diskusi publik merosot; ruang publik dipenuhi skeptisisme dan narasi konfrontatif. Dengan kata lain, atmosfer komunikasi yang buruk dapat memperparah disintegrasi sosial-politik jangka panjang sekaligus mendorong kemunduran politik.

3. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dan analisis studi kasus untuk memahami dinamika komunikasi pemerintahan dalam konteks kebijakan publik. Data penelitian diperoleh dari tiga sumber utama, yaitu dokumen kebijakan resmi berupa Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2025 dan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2025, pemberitaan media daring yang mencerminkan wacana publik serta framing komunikasi kebijakan oleh pemerintah daerah, dan literatur akademik yang membahas komunikasi pemerintahan, implementasi kebijakan publik, serta konsep legitimasi. Analisis dilakukan dengan menggunakan model komunikasi pemerintahan, Multiple Streams Framework (Kingdon), dan konsep legitimasi (Suchman, 1995) untuk menelaah proses pembentukan, penyampaian, serta penerimaan kebijakan publik oleh masyarakat. Pendekatan ini dipilih karena peristiwa yang dikaji bersifat sosial-politik kontemporer dan dapat dipahami secara mendalam melalui sumber sekunder serta kajian teoritis, tanpa memerlukan pengumpulan data lapangan, namun tetap mampu mengungkap konstruksi makna, proses kebijakan, dan legitimasi pemerintahan dalam konteks yang diteliti.

4. Hasil dan Pembahasan

Temuan Utama Penelitian

Penelitian ini mengungkapkan bahwa kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar 250% di Kabupaten Pati pada tahun 2025 menjadi contoh konkret kegagalan komunikasi pemerintahan dalam proses perumusan dan implementasi kebijakan publik. Minimnya sosialisasi, absennya partisipasi masyarakat, dan pernyataan publik Bupati yang dianggap arogan menyebabkan resistensi sosial yang sangat tinggi, hingga berujung pada demonstrasi besar-besaran dan krisis legitimasi pemerintah daerah.

Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Volume 11 No 9 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

Temuan utama menunjukkan bahwa:

1. **Komunikasi publik tidak berjalan secara partisipatif.** Pemerintah daerah menerapkan pola komunikasi *top-down* tanpa membuka ruang dialog dengan masyarakat.
2. **Ketiadaan transparansi dalam proses perumusan kebijakan.** Masyarakat tidak mendapatkan informasi yang memadai mengenai alasan kenaikan pajak dan dasar perhitungannya.
3. **Kegagalan koordinasi internal antar-lembaga pemerintahan.** DPRD tidak berperan efektif sebagai penghubung aspirasi publik dengan pemerintah eksekutif.
4. **Dampak sosial-politik signifikan.** Terjadi penurunan drastis kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah serta munculnya *political distrust* yang meluas.

Analisis Berdasarkan Teori Komunikasi Pemerintahan

Dalam kerangka teori komunikasi pemerintahan (Abidin, 2016), fungsi komunikasi sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat seharusnya menekankan prinsip dua arah (two-way communication). Namun, dalam kasus ini, pemerintah daerah hanya berfokus pada penyampaian keputusan tanpa mendengarkan tanggapan publik. Hal ini menciptakan asymmetric communication yang berujung pada persepsi publik bahwa pemerintah bersikap otoriter dan tidak empatik.

Proses komunikasi yang gagal ini juga menyebabkan hilangnya shared understanding pemahaman bersama antara pengambil kebijakan dan masyarakat. Seharusnya, komunikasi publik bukan hanya instrumen administratif, tetapi juga mekanisme membangun kepercayaan (trust building) dan legitimasi sosial.

Analisis Berdasarkan Teori Kebijakan Publik

Berdasarkan *Multiple Streams Framework* (Kingdon), kebijakan publik yang berhasil harus mampu menyelaraskan tiga aliran: *problem stream*, *policy stream*, dan *political stream*. Dalam kasus kenaikan PBB Kabupaten Pati:

- **Problem stream**: Pemerintah tidak menjelaskan dengan jelas masalah fiskal yang ingin diselesaikan.
- **Policy stream**: Alternatif kebijakan tidak dikomunikasikan kepada publik, sehingga masyarakat tidak memahami urgensinya.
- **Political stream**: Komunikasi politik gagal mengelola dukungan sosial dan malah menimbulkan resistensi.

Kegagalan menyatukan ketiga aliran ini menunjukkan lemahnya kemampuan komunikasi pemerintah dalam membuka *policy window* yang seharusnya menjadi momentum legitimasi kebijakan.

Dampak Komunikasi yang Tidak Efektif

1. **Krisis Legitimasi (Legitimation Crisis)**
   Mengacu pada teori *public sphere* Habermas (1991), absennya dialog publik menyebabkan krisis legitimasi terhadap pemerintah daerah. Ketika warga tidak dilibatkan, kebijakan dianggap tidak sah secara sosial.
2. **Meningkatnya Distrust Politik dan Konflik Sosial**
   Menurut Levi & Stoker (2000), hilangnya kepercayaan publik akan melahirkan resistensi terhadap kebijakan. Hal ini terbukti dari demonstrasi besar pada 13 Agustus 2025 yang menuntut pemakzulan Bupati Pati.
3. **Dampak terhadap Stabilitas Pemerintahan dan Ekonomi Daerah**

Ketidakpastian komunikasi politik menyebabkan investor enggan menanam modal dan menghambat pertumbuhan ekonomi lokal. Keputusan yang tidak dikomunikasikan dengan baik menurunkan *confidence* publik dan dunia usaha.

Rehabilitasi Komunikasi Pemerintahan

Untuk menghindari kasus serupa, penelitian ini merekomendasikan:

- Penerapan **model komunikasi partisipatif**, melalui forum konsultasi publik, sosialisasi berjenjang, dan penggunaan media digital secara strategis.
- Penguatan **koordinasi antar-lembaga** (eksekutif–legislatif) agar komunikasi kebijakan selaras dari perumusan hingga implementasi.
- Peningkatan **kompetensi komunikasi pejabat publik**, terutama dalam *crisis communication management* agar mampu merespons kritik masyarakat secara empatik dan profesional.

Hasil penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas kebijakan publik tidak hanya ditentukan oleh substansi kebijakan, tetapi sangat bergantung pada kualitas komunikasi pemerintahan. Kegagalan komunikasi yang terjadi di Kabupaten Pati menunjukkan bahwa:

- Tanpa komunikasi yang terbuka dan partisipatif, kebijakan berpotensi kehilangan legitimasi.
- Komunikasi publik yang buruk dapat memperkuat krisis kepercayaan, memperlemah stabilitas politik, dan berdampak pada ekonomi daerah.
- Pemerintah perlu menempatkan komunikasi sebagai strategi inti dalam tata kelola kebijakan publik.

5. Simpulan

Komunikasi pemerintahan merupakan elemen fundamental dalam keseluruhan siklus kebijakan publik. Kasus kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar 250% di Kabupaten Pati pada tahun 2025 menunjukkan bahwa tanpa komunikasi yang efektif, kebijakan yang secara administratif sah sekalipun dapat berujung pada resistensi sosial dan krisis legitimasi. Pemerintah Kabupaten Pati tidak berhasil menghadirkan proses komunikasi yang bersifat terbuka, dialogis, dan partisipatif, baik pada tahap perumusan masalah, penyusunan kebijakan, maupun pada fase implementasinya. Minimnya sosialisasi, tidak adanya pelibatan publik, serta penyampaian pesan yang tidak sensitif terhadap kondisi sosial-ekonomi masyarakat menjadi faktor yang memperburuk persepsi publik terhadap kebijakan tersebut.

Dalam konteks negara demokratis, kebijakan publik idealnya ditempatkan sebagai proses yang dinamis dan melibatkan interaksi dua arah antara pemerintah dan warga. Kegagalan komunikasi dalam kasus ini mencerminkan runtuhnya prinsip-prinsip dasar tersebut. Alih-alih menjadi instrumen untuk membangun pemahaman dan kepercayaan, komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah justru memunculkan jarak antara penguasa dan masyarakat. Pernyataan-pernyataan Bupati yang bernada konfrontatif memperkuat persepsi bahwa pemerintah tidak responsif terhadap aspirasi warga, sehingga memicu eskalasi protes dan meningkatkan ketegangan sosial.

Krisis komunikasi yang terjadi juga menimbulkan dampak multidimensional. Dari sisi sosial-politik, kasus ini memunculkan gelombang demonstrasi besar-besaran, menurunkan legitimasi pemerintah daerah, serta memperlemah kepercayaan masyarakat terhadap institusi politik, termasuk DPRD dan partai pengusung kepala daerah. Dari sisi tata kelola, hilangnya kepercayaan publik menjadi hambatan struktural dalam proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan di masa mendatang. Ketika warga tidak lagi yakin akan integritas dan orientasi kebijakan pemerintah, partisipasi publik melemah, respons masyarakat

terhadap program pemerintah menjadi negatif, dan dinamika politik daerah menjadi tidak stabil. Bahkan, dampak reputasional yang timbul dapat meluas hingga tingkat nasional dan memengaruhi persepsi terhadap partai politik tertentu.

Kasus ini dengan jelas menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan publik tidak hanya ditentukan oleh substansi kebijakannya, tetapi sangat bergantung pada bagaimana kebijakan tersebut dikomunikasikan. Komunikasi pemerintahan yang tidak transparan, tidak empatik, dan tidak melibatkan masyarakat berpotensi besar menciptakan penolakan kebijakan serta mengganggu kohesi sosial. Oleh karena itu, pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah harus menempatkan komunikasi sebagai pilar utama dalam tata kelola kebijakan publik. Penguatan komunikasi bukan sekadar sarana penyebaran informasi, melainkan strategi untuk membangun kepercayaan, menciptakan legitimasi, dan memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan dapat diterima serta dipahami oleh masyarakat.

Daftar Pustaka

Al Roni, H., & Sri Gunarsih, S. H. (2017). *Implementasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Menurut UU No. 6 Tahun 2014 (Studi Kasus di Desa Sidodadi Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen)* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).

Beach, D. S. (1965). Personnel: The management of people at work. *(No Title)*.

Habermas, J. (1991). *The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a Category of Bourgeois Society*. MIT Press.

https://www.kompas.tv/regional/611131/kenaikan-pbb-p2-sebesar-250-picu- demo-besar-di-pati-apa-itu-pbb-p2

Kanal Youtube INews. (2025). Naikkan PBB 250 Persen, Bupati Pati Tantang Warganya Demo. https://youtube.com/shorts/JZJwBwBdASc?si=bOoXWimPeqy3GtaK

Levi, M., & Stoker, L. (2000). Political Trust and Trustworthiness. *Annual Review of Political Science*, 3(1), 475–507.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Persada, G. (2025). Kenaikan PBB-P2 Sebesar 250% Picu Demo Besar di Pati, Apa Itu PBB-P2?

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.